

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka dan regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah. Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun bersangkutan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman dan landasan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2019 untuk melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini adalah menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan serta sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019 meliputi :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017**

- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.3 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD**

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2017**

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan. Renstra OPD didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD tahun berjalan.

#### **2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats*) sebagai berikut :

##### **a. Kekuatan (Strengths)**

Faktor-faktor kekuatan secara internal dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan daerah sebagai dasar hukum yang mengatur tentang kewenangan daerah;

2. Memiliki posisi strategis dalam kewenangan sebagai pengelola keuangan dan aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Tersedianya sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan pada semua OPD dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
4. Memiliki sarana, prasarana dan system informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPAD;
5. Adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

**b. Kelemahan (Weakness)**

Faktor-faktor kelemahan secara internal dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki etos kerja dan tanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKPAD serta masih kurangnya disiplin kerja;
2. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan yang disebabkan kompleksitas

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang intensitas pekerjaan relatif tinggi;

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**c. Peluang (Opportunities)**

Faktor-faktor peluang secara eksternal dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Fungsi BPKPAD yang cukup penting dan strategis dalam pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Mudahnnya melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD tingkat Kabupaten dan instansi lainnya;
3. Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atasan dan atau lembaga / instansi lainnya.

**d. Ancaman (Threats)**

Faktor-faktor tantangan secara eksternal dalam tata kelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;



2. Sering terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang besarnya tidak bersifat final.
3. Sering terjadinya perbedaan persepsi tentang implementasi ketentuan peraturan dengan aparaturnya pemeriksa.

### **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci yang disusun oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Indikator kinerja kunci disusun berdasarkan usulan yang diterima dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen berdasarkan aspek penilaian dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.

Evaluasi Hasil Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra OPDBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 dapat dilihat pada **tabel 2.1**.

## **2.2. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Potensi Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain :

1. Potensi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola terdiri dari :
  - a. Pendapatan Pajak Daerah (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Bahan Galian, Bumi dan Bangunan)
  - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah/PT. Bank Sumut)
  - c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan jasa giro, hasil investasi jangka pendek, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/TGR, dan Denda keterlambatan serta pengembalian)

### 2. Struktur Organisasi

Pejabat dan staf yang merupakan sumber daya manusia yang andal, terampil, dan terus berkembang jauh. Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok tersebut di atas telah dibentuk struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang mana tersaji pada gambar 2.1.

### 3. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang terdiri dari barang dan jasa serta aset tetap yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah membawahi:

1.1 Sekretraris, yang terdiri dari :

1.1.1 Kasubbag Umum

1.1.2 Kasubbag Perencanaan

1.1.3 Kasubbag Keuangan

1.2 Kepala Bidang Pendapatan, terdiri dari :

1.2.1 Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan

1.2.2 Kepala Subbidang Pemungutan dan Pengendalian

1.2.3 Kepala Subbidang Pengelolaan PBB dan BPHTB

1.3 Kepala Bidang Anggaran, terdiri dari :

1.3.1 Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan

1.3.2 Kepala Subbidang Anggaran Perekonomian dan Pembangunan

1.3.3 Kepala Subbidang Anggaran Administrasi dan Kesejahteraan

Rakyat

1.4 Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :

1.4.1 Kepala Subbidang Perbendaharaan dan Verifikasi

1.4.2 Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Keuangan

1.4.3 Kepala Subbidang Penggajian

1.5 Kepala Bidang Aset Daerah, terdiri dari :

1.5.1 Kepala Subbidang Penilaian dan Penghapusan

1.5.2 Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan

1.5.3 Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan

Selain membawahi pejabat struktural, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam fungsinya sebagai PPKD dan BUD serta Kepala SKPD/SKPKD dan Kepala SKPKD, juga membawahi secara langsung para pejabat Kuasa BUD, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPTK dan pejabat lainnya yang menerima pelimpahan wewenang

BPKPAD dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana strategis, Rencana kerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKPAD;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan BPKPAD;
- c. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan APBD;
- f. Pengelolaan Pajak Daerah;
- g. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
- h. Pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

- i. Pengoordinasian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- j. Pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- l. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Pembinaan Perbendaharaan pada SKPD/SKPKD;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan analisis investasi, divestasi dan pembentukan dana cadangan daerah;
- o. Pelaksanakan pembinaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah;
- q. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPKPAD.

Dalam melaksanakan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, terdapat isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan OPD;
  - a. Pelayanan perpajakan daerah yang tertib dan lancar

- b. Pelayanan dalam pencairan dana ke OPD yang segera ditindaklanjuti.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- a. Kurangnya jumlah personil untuk petugas pemungut pajak dan kurangnya sarana kerja yang dimiliki sehingga mengakibatkan belum optimalnya kinerja aparatur pemungut pajak mengingat luasnya WILAYAH Kabupaten Humbang Hasundutan;
  - b. Masih belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait pengelola pendapatan daerah dengan BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan yang berdampak pada penetapan target pendapatan dari masing-masing OPD terkait tersebut;
  - c. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah BPKPAD Kabupaten Humbang Hasundutan seringkali mengalami kesulitan terutama karena terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengharuskan OPD untuk melakukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku, dan ini memerlukan waktu yang relatif lama dalam menyiapkan regulasi baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - d. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami kendala dalam pengelolaan aset daerah dikarenakan minimnya aparatur yang ada serta kualitas SDM yang belum memadai sedangkan aset yang dikelola begitu besar dan tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan dan dikelola oleh 98 (sembilan puluh delapan) OPD se-Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Dampaknya terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian Nasional/ Internasional;

Berdasarkan visi dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Yaitu ***”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel dan Unggul”***, sepertinya tidak mudah untuk merealisasikan dalam jangka waktu yang singkat. Perlu waktu dan kerjasama yang sinergis untuk mewujudkan visi tersebut terlebih dengan kondisi SDM aparatur BPKPAD yang masih sangat terbatas baik dari segi jumlah aparatur maupun kualitas SDM aparatur yang ada. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mungkin masih belum sesuai dengan yang diharapkan, namun BPKPAD setiap tahunnya selalu meningkatkan sistem pengendalian yang memadai serta menyajikan laporan keuangan dan laporan aset yang akuntabel, sehingga akan berdampak positif terhadap pencapaian visi Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu mewujudkan Humbang Hasundutan yang hebat dan bermentalitas unggul, khususnya melalui misi ketiga yaitu meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah merupakan bagian integral dari pengelola keuangan negara. Hal ini ditandai dengan adanya Implementasi Aplikasi TEPRA pada Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta. Oleh sebab itu keberhasilan pengelolaan keuangan Kabupaten Humbang Hasundutan akan berdampak positif terhadap capaian kinerja pengelolaan keuangan negara secara nasional maupun internasional.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD ;
  - a. Pemutahiran database potensi pajak daerah

- b. Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti diklat, bimtek, workshop dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah
  - c. Melaksanakan sensus Barang Milik Daerah.
5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;
- a. Peningkatan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah;
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.



### **2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Renja OPD**

Review terhadap Rancangan Awal Renja SKPD TA. 2019 ini didasarkan pada evaluasi atas realisasi program dan kegiatan yang sudah memenuhi target sebagai berikut :

1. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
  - a. Penyediaan Jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
  - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
  - g. Menyediakan Makanan dan Minuman
  - h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
  - i. Penyediaan Jasa Non PNS
  - j. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
  - k. Penyediaan jasa administrasi perbendaharaan
  - l. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - n. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - o. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - p. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - q. Penilaian dan Penghapusan Asset
  - r. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
  - s. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah
  - t. Penyediaan jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah

- u. Pengamanan Aset Daerah
- v. Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah
- w. Penyediaan Jasa Konsultan Penilaian dan Penghapusan Aset Milik Daerah
- x. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- y. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- z. Penyempurnaan Saldo Aset Tetap Tahun Anggaran dalam Penyusunan LKPD Kab. Humbang Hasundutan
- å. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD
- ä. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- ö. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- aa. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD
- bb. Penelitian DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD
- cc. Administrasi Pengendalian anggaran
- dd. Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan dan Gaji ke-13
- ee. Komputerisasi Daftar Gaji Reguler
- ff. Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengendalian Dana-dana Kas Daerah
- gg. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- hh. Operasional Aplikasi Kas Daerah secara On-line dengan Jaringan PT. Bank Sumut

- ii. Pengendalian pencairan belanja hibah dan bantuan sosial
- jj. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- kk. Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah
- ll. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah
- mm. Pendataan dan pemutakhiran data PBB P2
- nn. Penyusunan Mekanisme/Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- oo. Implementasi Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2
- pp. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah

Review terhadap Rancangan Awal Renja dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.3

#### **2.4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan, baik yang akan didanai dari Belanja Tidak langsung maupun didanai dengan Belanja langsung.

Kegiatan masyarakat yang bukan didanai dari Belanja Tidak langsung antara lain:

- a. Hibah
- b. Bantuan Sosial
- c. Subsidi
- d. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah
- e. Belanja Tidak Terduga

Sedangkan program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang akan didanai dari Belanja langsung adalah:

- a. Program peningkatan laporan capaian kinerja keuangan, yakni kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Aset Pemerintah Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Teknis aparat desa dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Desa;
- b. Program Peningkatan Pendapatan Daerah, yaitu terdiri dari kegiatan:
  1. Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  3. Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah.

## **BAB III.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Pengelolaan Keuangan pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan diberi kewenangan pengelolaan bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara teknis operasional bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan/aset daerah. Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka, hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun

menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Selaku pelaku ekonomi maupun sosial budaya, peran serta masyarakat menempati posisi tertinggi oleh karena itu perlu senantiasa diharapkan dalam mendukung upaya upaya menumbuhkan kemandirian daerah. Dengan kata lain peran serta masyarakat dalam proses pembangunan di daerah perlu didorong secara optimal.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengeloan Keuangan Pendapatan dan Aset Derah Kabupaten Humbang Hasundutan.**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah :  
**"MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL"**

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan;
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Dalam hal ini, untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupten Humbang Hasundutan, Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai.

- **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam merealisasikan visi dan misi adalah **“Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**.

- **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
3. Meningkatnya penerimaan daerah.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Usulan program dan kegiatan harus memiliki relevansi dengan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah dalam merumuskan di bidang Pendapatan yaitu melaksanakan pemungutan pajak serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan asset daerah. Bila dikaitkan dengan Visi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 yaitu *“Mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Hebat Dan Bermentalitas Unggul”*, maka dapat dirumuskan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 seperti pada table berikut :



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu rencana strategis, sebagai rangkaian yang saling terkait erat dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang ditetapkan, dan bersifat jangka panjang dan menengah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
6. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan direncanakan dan disusun sebagai acuan kerangka program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka melaksanakan misi, dan mewujudkan visi pembangunan daerah yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Doloksanggul,

2018

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
PENDAPATANDAN  
ASET DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



**Drs. JOHN HARRY, M.MA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650424 199103 1 006**

**TABEL 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program / Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12				
<b>1.20.1.20.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>														
	<i>Kegiatan :</i>														
1	05	01	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	19.500.000.000	3.492.992.372	3.726.000.000	3.684.078.432	98,87	84.000.000	7.261.070.804	37,24	
2	05	01	01	02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	128.300.550	25.381.000	46.958.569	46.093.100	98,16	36.308.233	107.782.333	84,01	
3	05	01	01	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	524.828.000	104.658.200	66.000.100	53.505.500	81,07	51.171.500	209.335.200	39,89	
4	05	01	01	10	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	174.943.000	104.658.200	34.988.600	34.824.750	99,53	32.941.750	172.424.700	98,56	

5	05	01	01	11	Penyediaan Komp. Instalasi Listrik	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	174.943.000	34.806.500	6.625.000	6.610.000	99,77	6.625.000	48.041.500	27,46	
6	05	01	01	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang yang terpenuhi	55.200.000					55.200.000	55.200.000	100,00	
7	05	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi	495.000.000	97.782.000	Rp 130.000.000	129.930.000	99,95	89.300.000	317.012.000	64,04	
8	05	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi	4.513.900.000	900.512.011	795.750.000	786.560.194	98,85	684.086.000	2.371.158.205	52,53	
9	05	01	01	19	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah jasa non PNS yang terpenuhi	3.654.000.000	637.200.000	1.153.500.000	1.110.300.000	96,25	1.146.300.000	2.893.800.000	79,20	
10	05	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang terpenuhi	236.900.000	47.157.000	47.380.000	42.102.000	88,86	32.681.000	121.940.000	51,47	
11	05	01	01	21	Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan	Jumlah jasa administrasi perbendaharaan yang terpenuhi	3.436.500.000	661.487.500	619.525.000	555.925.000	89,73	207.925.000	1.425.337.500	41,48	
12	05	01	02	49	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa pengelolaan BMD yang terpenuhi	3.018.000.000	0	604.350.000	578.550.000	95,73	200.550.000	779.100.000	25,82	
<b>1.20.1.20.</b>					<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>										
					<b>Kegiatan :</b>										
1	05	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1.498.500.000	243.936.740	173.200.000	88.985.000	51,38	31.000.000	363.921.740	24,29	
2	05	01	02	11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	500.000.000	99.631.000	210.000.000	198.792.500	94,66	20.000.000	318.423.500	63,68	
3	05	01	02	12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	600.000.000	47.567.675	106.800.000	56.274.938	52,69	70.200.000	174.042.613	29,01	

4	05	01	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	165.000.000	28.877.500	13.000.000	13.000.000	100,00	16.000.000	57.877.500	35,08
---	----	----	----	----	--	---	-------------	------------	------------	------------	--------	------------	------------	-------

1.20.1.20.					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1.20.1.20.					Kegiatan :									
1	05	01	05	06	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM	Persentase keikutsertaan ASN BPKPAD dalam mengikuti Bimbingan Teknis	750.000.000	148.284.008	150.000.000	149.228.765	99,49	75.000.000	372.512.773	49,67
2	05	01	17	21	Bimbingan teknis dan pelatihan keuangan berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah	Persentase ASN Pengelola Keuangan yang mengikuti Bimtek Pelatihan Keuangan berbasis akrual	607.862.000	0	121.572.400	0	0,00	124.123.300	124.123.300	20,42
					Bimbingan teknis Penatausahaan BMD	Persentase peserta Bimtek yang mampu menyusun Laporan BMD	-	-	-	-	-	-	-	-
4	05	01	17	22	Bimbingan tehnik Penyusunan Anggaran	Persentase ASN Pengelola Keuangan yaang mengikuti Bimtek penyusunan anggaran	912.430.000	0	182.486.000	152.113.000	83,36	107.838.300	259.951.300	28,49
					Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai	Persentase OPD yang meengimplementasikan Transaksi Non Tunai	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.1.20.					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1.20.1.20.					Kegiatan :									
1	05	01	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Semester dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya	252.704.830	50.456.900	59.159.132	54.708.100	92,48	38.542.300	143.707.300	56,87

2	05	01	06	05	Penyempurnaan Saldo Aset Tetap dalam Penyusunan LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan	Temuan BPK terhadap penyajian nilai aset tetap dalam neraca	529.796.650	103.898.200	154.453.250	139.517.250	90,33	162.135.600	405.551.050	76,55
3	05	01	06	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	627.875.160	98.418.320	196.938.311	185.966.013	94,43	141.292.300	425.676.633	67,80
4	05	01	06	07	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan APBD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	582.076.750	115.696.331	130.696.432	112.520.106	86,09	144.547.400	372.763.837	64,04
5	05	01	06		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, LAKIP dan Bahan LPPD	Laporan pelaksanaan kegiatan OPD	314.953.160		62.990.632	49.616.900	78,77	26.960.300	76.577.200	24,31
6	05	01	06	06	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Dokumen perencanaan yang tersusun	156.095.660		31.219.132	25.181.200	80,66	18.230.100	43.411.300	27,81
7	05	01	06	07	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Operasional TEPR	Laporan bulanan realisasi anggaran yang tepat waktu	554.663.500		110.932.700	87.733.100	79,09	81.790.300	169.523.400	30,56
8	05	01	06	08	Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan SKPKD	Persentase Realisasi Keuangan OPD	14.981.100					14.981.100	14.981.100	100,00
<b>1.20.1.20.</b>					<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan :</b>									
1	05	01	17	06	Penyusunan Standar Satuan Harga, Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Regulasi yang diterbitkan	1.390.626.500		278.125.300	189.498.000	68,13	176.737.700	366.235.700	26,34



11	05	01	17	26	Operasional Aplikasi Kas Daerah secara On-line dengan Jaringan PT. Bank Sumut	SK2D yang diterbitkan melalui CMS dari PT Bank Sumut	284.050.000	56.434.000	74.740.000	60.268.000	80,64	78.321.400	195.023.400	68,66
12	05	01	17	27	Pengendalian Pencairan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Persentase realisasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang dibayarkan	406.692.500	81.192.625	146.801.500	117.390.070	79,97	86.582.600	285.165.295	70,12
13	05	01	17	28	Implementasi Aplikasi Penganggaran E-Budgeting	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan aplikasi E-Budgeting	534.519.300	0	38.710.174	32.930.000	85,07	109.093.000	142.023.000	26,57
14	05	01	17	32	Penyusunan KUA dan PPAS APBD	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS APBD	191.081.100					191.081.100	191.081.100	100,00
15	05	01	17	33	Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS P-APBD	152.301.500					152.301.500	152.301.500	100,00
16	05	01	17	34	Penyusunan Mekanisme /Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan	44.585.800					44.585.800	44.585.800	100,00
17	05	01	17	35	Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa melalui Aplikasi OMSPAN	Persentase Realisasi dana DAK dan dana Desa	57.309.100					57.309.100	57.309.100	100,00
18	05	01	02	45	Penilaian dan Penghapusan BMD	Persentase BMD yang telah dihapuskan	873.890.000	166.506.000	235.145.700	216.012.200	91,86	208.420.500	590.938.700	67,62
19	05	01	02	46	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	Persentase BMD yang telah dihapuskan	1.752.611.475	251.361.608	160.000.000	127.690.700	79,81	77.915.100	456.967.408	26,07
20	05	01	02	51	Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang telah dileleh/hibah/pemusnahan	726.370.000	51.593.500	155.380.800	121.214.800	78,01	131.309.200	304.117.500	41,87
21	05	01	02	51	Penetapan Status Barang Milik Daerah	Persentase status BMD yang telah ditetapkan	423.945.000	0	84.789.000	76.008.000	89,64	58.285.500	134.293.500	31,68
<b>1.20.1.20.</b>					<b>Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b> <i>Kegiatan :</i>									



1	05	01	61	01	Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase wajib pajak yang membayar pajak	719.633.150	142.262.630	89.427.000	88.198.500	98,63	93.952.000	324.413.130	45,08		
2	05	01	61	02	Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah	Persentase penerimaan daerah dari pajak daerah	737.925.000	0	184.610.000	159.742.100	86,53	124.097.300	283.839.400	38,46		
3	05	01	61	03	Ekstensifikasi dan Penetapan Pajak daerah	Wajib pajak yang terdaftar	715.469.500	0	132.713.900	116.621.400	87,87	99.121.000	215.742.400	30,15		
4	05	01	61	04	Penyusunan Mekanisme /Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan	478.747.500	92.393.450	62.385.000	59.080.900	94,70	32.175.000	183.649.350	38,36		
5	05	01	61	05	Implementasi Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2	Persentase peningkatan PAD dan PBB-P2	1.307.920.000	246.653.850	220.183.000	216.673.000	98,41	237.063.500	700.390.350	53,55		
6	05	01	61	05	Penyusunan laporan pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan	Temuan BPK terhadap penyajian nilai pendapatan dalam LRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	05	01	61	06	Verifikasi Piutang PBB-P2	Desa yang memiliki data piutang PBB-P2 yang telah terverifikasi	264.560.000		52.912.000	29.848.000	56,41	50.764.300	80.612.300	30,47		
					Pengembangan sistem pengelolaan BPHTB berbasis online	Realisasi BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Rekonsiliasi dana bagi hasil	Persentase pendapatan daerah dari DBH	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>1.20.1.20.</b>					<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah</b>											
					<b>Kegiatan :</b>											
1	05	01	02	47	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Persentase tanah milik Pemerintah yang bersertifikat	749.956.000	126.002.700	296.754.200	243.286.760	81,98	268.674.900	637.964.360	85,07		
2	05	01	02	50	Pengamanan BMD Daerah	Persentase tanah yang telah memiliki plank tanah	722.446.590	143.846.400	172.378.000	154.647.000	89,71	101.671.500	400.164.900	55,39		

**TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN N-2	TAHUN N-1	TAHUN N	TAHUN N+1	TAHUN N-1	TAHUN N	TAHUN N	TAHUN N+1	
1	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	-	-	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
2	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	-	-	14 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	
3	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	-	-	40 item	43 item	46 item	49 item	43 item	46 item	46 item	49 item	
4	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	-	-	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	
5	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	-	-	7 item	8 item	9 item	10 item	8 item	9 item	9 item	10 item	
6	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	-	-	-	78 jenis	78 jenis	78 jenis	78 jenis	78 jenis	78 jenis	78 jenis	
7	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi	-	-	3 kebutuhan	3 kebutuhan	3 kebutuhan	3 kebutuhan	3 kebutuhan	3 kebutuhan	3 kebutuhan	3 kebutuhan	
8	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi	-	-	110 kali	124 kali	140 kali	156 kali	124 kali	140 kali	140 kali	156 kali	
9	Jumlah jasa non PNS yang terpenuhi	-	-	51 orang	51 orang	51 orang	51 orang	51 orang	51 orang	51 orang	51 orang	
10	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang terpenuhi	-	-	124 kali	124 kali	124 kali	124 kali	124 kali	124 kali	124 kali	124 kali	
11	Jumlah jasa administrasi perbendaharaan yang terpenuhi	-	-	17 orang	17 orang	17 orang	17 orang	17 orang	17 orang	17 orang	17 orang	
12	Jumlah jasa pengelolaan BMD yang terpenuhi	-	-	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	
13	Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	-	15 unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	

14	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	-	-	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	
16	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	-	-	82%	85%	88%	91%	88%	91%	88%	91%	
17	Persentase keikutsertaan ASN BPKPAD dalam mengikuti Bimbingan Teknis	-	-	85%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
18	Persentase ASN Pengelola Keuangan yang mengikuti Bimtek Pelatihan Keuangan berbasis akrual	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19	Persentase peserta Bimtek yang mampu menyusun Laporan BMD	-	-	90%	93%	95%	97%	95%	97%	95%	97%	
20	Persentase ASN Pengelola Keuangan yang mengikuti Bimtek penyusunan anggaran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Persentase OPD yang mengimplementasikan Transaksi Non Tunai	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Semester dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
23	Temuan BPK terhadap penyajian nilai aset tetap dalam neraca	-	-	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	
24	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
25	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
26	Laporan pelaksanaan kegiatan OPD	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
27	Dokumen perencanaan yang tersusun	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
28	Laporan bulanan realisasi anggaran yang tepat waktu	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
29	Persentase Realisasi Keuangan OPD	-	-	-	95%	96%	97%	96%	97%	96%	97%	
30	Regulasi yang diterbitkan	-	-	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	

31	Peraturan yang diterbitkan	-	-	-	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	1 Peraturan	
32	Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang APBD	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
33	Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang P-ABPD	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
34	Persentase DPA/DPPA yang telah diteliti sebagai dasar pelaksanaan anggaran	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
35	Persentase surat penyediaan dana yang diterbitkan sesuai dengan anggaran kas	-	-	80%	83%	85%	87%	85%	87%	85%	87%	
36	Dokumen gaji yang diterbitkan sesuai dengan usulan penggajian OPD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
37	Ketepatan waktu dalam penerbitan daftar gaji reguler	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
38	Ketepatan waktu pelaporan dana kas daerah	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
39	Laporan informasi Keuangan Daerah yang tepat waktu	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
40	SP2D yang diterbitkan melalui CMS dari PT Bank Sumut	-	-	5.100 SP2D	5.200 SP2D	5.300 SP2D	5.400 SP2D	5.300 SP2D	5.400 SP2D	5.300 SP2D	5.400 SP2D	
41	Persentase realisasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang dibayarkan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
42	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan aplikasi E-Budgeting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS APBD	-	-	85%	87%	90%	93%	90%	93%	90%	93%	
44	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS P-APBD	-	-	85%	87%	90%	93%	90%	93%	90%	93%	
45	Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan	-	-	-	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	
46	Persentase Realisasi dana DAK dan dana Desa	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
47	Persentase BMD yang telah dihapuskan	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

48	Persentase BMD yang dicatatkan dalam SIMDA BMD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
49	Persentase BMD yang telah dilelang/hibah/pemusnahan	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
50	Persentase status BMD yang telah ditetapkan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
51	Persentase wajib pajak yang membayar pajak	-	-	65%	70%	75%	80%	75%	80%	75%	80%	
52	Persentase penerimaan daerah dari pajak daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
53	Wajib pajak yang terdaftar			65.375 WP	65.675 WP	65.975 WP	65.275 WP	65.975 WP	65.975 WP	65.975 WP	65.275 WP	
54	Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan			2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	2 Peraturan	
55	Persentase peningkatan PAD dan PBB-P2			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
56	Temuan BPK terhadap penyajian nilai pendapatan dalam LRA			0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	0 Temuan	
57	Desa yang memiliki data piutang PBB-P2 yang telah terverifikasi			18 Desa	23 Desa	28 Desa	33 Desa	28 Desa	33 Desa	28 Desa	33 Desa	
58	Realisasi BPHTB				300 (dalam juta rupiah)	325 (dalam juta rupiah)	350 (dalam juta rupiah)	325 (dalam juta rupiah)	350 (dalam juta rupiah)	325 (dalam juta rupiah)	350 (dalam juta rupiah)	
59	Persentase pendapatan daerah dari DBH			0	1	0	-	0	-	0	-	
60	Persentase tanah milik Pemerintah yang bersertifikat			45%	55%	60%	65%	60%	65%	60%	65%	
61	Persentase tanah yang telah memiliki plank tanah			43%	53%	58%	63%	58%	63%	58%	63%	

**TABEL 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAEAH**

NO	Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	<i>Kegiatan :</i>					<i>Kegiatan :</i>					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPAD	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	2 jenis	88.126.400,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKPAD	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	2 jenis	88.126.400,00	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKPAD	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	16 jenis	28.543.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKPAD	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	16 jenis	28.543.000,00	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKPAD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	46 item	40.301.844,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKPAD	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	46 item	40.301.844,00	
4	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	BPKPAD	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	4 jenis	27.637.950,00	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	BPKPAD	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	4 jenis	27.637.950,00	
5	Penyediaan Komp. Instalasi Listrik	BPKPAD	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	9 item	6.736.600,00	Penyediaan Komp. Instalasi Listrik	BPKPAD	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	9 item	6.736.600,00	

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPAD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	78 jenis	57.960.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKPAD	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	78 jenis	57.960.000,00	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKPAD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi	3 kebutuhan	88.780.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKPAD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi	3 kebutuhan	88.780.000,00	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BPKPAD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi	140 kali	648.320.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BPKPAD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi	140 kali	648.320.000,00	
9	Penyediaan Jasa Non PNS	BPKPAD	Jumlah jasa non PNS yang terpenuhi	51 orang	1.119.600.000,00	Penyediaan Jasa Non PNS	BPKPAD	Jumlah jasa non PNS yang terpenuhi	51 orang	1.119.600.000,00	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	BPKPAD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang terpenuhi	124 kali	34.250.000,00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	BPKPAD	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang terpenuhi	124 kali	34.250.000,00	
11	Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan	BPKPAD	Jumlah jasa administrasi perbendaharaan yang terpenuhi	17 orang	233.075.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan	BPKPAD	Jumlah jasa administrasi perbendaharaan yang terpenuhi	17 orang	233.075.000,00	
12	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah jasa pengelolaan BMD yang terpenuhi	9 orang	60.100.000,00	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Jumlah jasa pengelolaan BMD yang terpenuhi	9 orang	60.100.000,00	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>					
<i>Kegiatan :</i>						<i>Kegiatan :</i>					
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPKPAD	Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	26 unit	52.336.700,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	BPKPAD	Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	26 unit	52.336.700,00	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKPAD	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	20.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKPAD	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100%	20.000.000,00	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKPAD	Kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	18 unit	75.940.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKPAD	Kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	18 unit	75.940.000,00	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKPAD	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	88%	20.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BPKPAD	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	88%	20.000.000,00	

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
<i>Kegiatan :</i>					<i>Kegiatan :</i>					
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM	BPKPAD	Persentase keikutsertaan ASN BPKPAD dalam mengikuti Bimbingan Teknis	95%	75.000.000,00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM	BPKPAD	Persentase keikutsertaan ASN BPKPAD dalam mengikuti Bimbingan Teknis	95%	75.000.000,00
2	Bimbingan teknis dan pelatihan keuangan berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah	BPKPAD	Persentase ASN Pengelola Keuangan yang mengikuti Bimtek Pelatihan Keuangan berbasis akrual	100%	128.620.900,00	Bimbingan teknis dan pelatihan keuangan berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah	BPKPAD	Persentase ASN Pengelola Keuangan yang mengikuti Bimtek Pelatihan Keuangan berbasis akrual	100%	128.620.900,00
3	Bimbingan teknis Penatausahaan BMD	BPKPAD	Persentase peserta Bimtek yang mampu menyusun Laporan BMD	100%	202.266.000,00	Bimbingan teknis Penatausahaan BMD	BPKPAD	Persentase peserta Bimtek yang mampu menyusun Laporan BMD	100%	202.266.000,00
4	Bimbingan teknis Penyusunan Anggaran	BPKPAD	Persentase ASN Pengelola Keuangan yaang mengikuti Bimtek penyusunan anggaran	95%	89.233.200,00	Bimbingan teknis Penyusunan Anggaran	BPKPAD	Persentase ASN Pengelola Keuangan yaang mengikuti Bimtek penyusunan anggaran	95%	89.233.200,00
5	Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai	BPKPAD	Persentase OPD yang mengimplementasikan Transaksi Non Tunai	100%	48.704.000,00	Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai	BPKPAD	Persentase OPD yang mengimplementasikan Transaksi Non Tunai	100%	48.704.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
<i>Kegiatan :</i>					<i>Kegiatan :</i>					
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Semester dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya	Tepat waktu	38.501.700,00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Semester dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya	Tepat waktu	38.501.700,00



2	Penyempurnaan Saldo Aset Tetap dalam Penyusunan LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan	BPKPAD	Temuan BPK terhadap penyajian nilai aset tetap dalam neraca	0	159.295.000,00	Penyempurnaan Saldo Aset Tetap dalam Penyusunan LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan	BPKPAD	Temuan BPK terhadap penyajian nilai aset tetap dalam neraca	0	159.295.000,00	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD	BPKPAD	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tepat waktu	124.989.800,00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD	BPKPAD	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tepat waktu	124.989.800,00	
4	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan APBD	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat waktu	143.154.700,00	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan APBD	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat waktu	143.154.700,00	
5	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, LAKIP dan Bahan LPPD	BPKPAD	Laporan pelaksanaan kegiatan OPD	3 Dokumen	27.913.900,00	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, LAKIP dan Bahan LPPD	BPKPAD	Laporan pelaksanaan kegiatan OPD	3 Dokumen	27.913.900,00	
6	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	BPKPAD	Dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	10.873.950,00	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	BPKPAD	Dokumen perencanaan yang tersusun	2 Dokumen	10.873.950,00	
7	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Operasional TEPR	BPKPAD	Laporan bulanan realisasi anggaran yang tepat waktu	Tepat waktu	64.368.500,00	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Operasional TEPR	BPKPAD	Laporan bulanan realisasi anggaran yang tepat waktu	Tepat waktu	64.368.500,00	
8	Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan SKPKD	BPKPAD	Persentase Realisasi Keuangan OPD	96%	49.900.300,00	Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan SKPKD	BPKPAD	Persentase Realisasi Keuangan OPD	96%	49.900.300,00	

Program Peningkatan dan Pengembangan						Program Peningkatan dan Pengembangan					
Pengelolaan Keuangan Daerah						Pengelolaan Keuangan Daerah					
Kegiatan :						Kegiatan :					
1	Penyusunan Standar Satuan Harga, Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan	BPKPAD	Regulasi yang diterbitkan	1 Regulasi	184.845.500,00	Penyusunan Standar Satuan Harga, Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan	BPKPAD	Regulasi yang diterbitkan	1 Regulasi	184.845.500,00	
2	Penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	BPKPAD	Peraturan yang diterbitkan	1 Peraturan	29.934.016,00	Penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	BPKPAD	Peraturan yang diterbitkan	1 Peraturan	29.934.016,00	
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang Penjabaran APBD	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang APBD	Tepat waktu	413.366.500,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang Penjabaran APBD	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang APBD	Tepat waktu	413.366.500,00	
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang P-ABPD	Tepat waktu	300.259.160,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang P-ABPD	Tepat waktu	300.259.160,00	
5	Penelitian DPA-SKPD/DPPA-SKPD/Anggaran Kas SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD/Anggaran Kas PPKD	BPKPAD	Persentase DPA/DPPA yang telah diteliti sebagai dasar pelaksanaan anggaran	100%	72.896.200,00	Penelitian DPA-SKPD/DPPA-SKPD/Anggaran Kas SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD/Anggaran Kas PPKD	BPKPAD	Persentase DPA/DPPA yang telah diteliti sebagai dasar pelaksanaan anggaran	100%	72.896.200,00	
6	Administrasi pengendalian dana APBD	BPKPAD	Persentase surat penyediaan dana yang diterbitkan sesuai dengan anggaran kas	85%	205.924.598,00	Administrasi pengendalian dana APBD	BPKPAD	Persentase surat penyediaan dana yang diterbitkan sesuai dengan anggaran kas	85%	205.924.598,00	
7	Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan dan Gaji ke-13 dan THR	BPKPAD	Dokumen gaji yang diterbitkan sesuai dengan usulan penggajian OPD	100%	65.160.000,00	Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan dan Gaji ke-13 dan THR	BPKPAD	Dokumen gaji yang diterbitkan sesuai dengan usulan penggajian OPD	100%	65.160.000,00	
8	Komputerisasi daftar gaji reguler	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penerbitan daftar gaji reguler	Tepat waktu	61.529.700,00	Komputerisasi daftar gaji reguler	BPKPAD	Ketepatan waktu dalam penerbitan daftar gaji reguler	Tepat waktu	61.529.700,00	

9	Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengendalian Dana-dana Kas Daerah	BPKPAD	Ketepatan waktu pelaporan dana kas daerah	Tepat waktu	142.644.700,00	Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengendalian Dana-dana Kas Daerah	BPKPAD	Ketepatan waktu pelaporan dana kas daerah	Tepat waktu	142.644.700,00	
10	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	BPKPAD	Laporan informasi Keuangan Daerah yang tepat waktu	Tepat waktu	169.695.048,00	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	BPKPAD	Laporan informasi Keuangan Daerah yang tepat waktu	Tepat waktu	169.695.048,00	
11	Operasional Aplikasi Kas Daerah secara On-line dengan Jaringan PT. Bank Sumut	BPKPAD	SK2D yang diterbitkan melalui CMS dari PT Bank Sumut	100%	65.921.726,00	Operasional Aplikasi Kas Daerah secara On-line dengan Jaringan PT. Bank Sumut	BPKPAD	SK2D yang diterbitkan melalui CMS dari PT Bank Sumut	100%	65.921.726,00	
12	Pengendalian Pencairan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	BPKPAD	Persentase realisasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang dibayarkan	100%	73.189.000,00	Pengendalian Pencairan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	BPKPAD	Persentase realisasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang dibayarkan	100%	73.189.000,00	
13	Implementasi Aplikasi Penganggaran E-Budgeting	BPKPAD	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan aplikasi E-Budgeting	-	114.827.800,00	Implementasi Aplikasi Penganggaran E-Budgeting	BPKPAD	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan aplikasi E-Budgeting	-	114.827.800,00	
14	Penyusunan KUA dan PPAS APBD	BPKPAD	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS APBD	90%	165.381.600,00	Penyusunan KUA dan PPAS APBD	BPKPAD	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS APBD	90%	165.381.600,00	
15	Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD	BPKPAD	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS P-APBD	90%	158.484.200,00	Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD	BPKPAD	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS P-APBD	90%	158.484.200,00	
16	Penyusunan Mekanisme /Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD	Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan	2 Peraturan	45.994.700,00	Penyusunan Mekanisme /Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD	Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan	2 Peraturan	45.994.700,00	
17	Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa melalui Aplikasi OMSPAN	BPKPAD	Persentase Realisasi dana DAK dan dana Desa	100%	59.675.100,00	Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa melalui Aplikasi OMSPAN	BPKPAD	Persentase Realisasi dana DAK dan dana Desa	100%	59.675.100,00	
18	Penilaian dan Penghapusan BMD	BPKPAD	Persentase BMD yang telah dihapuskan	100%	208.404.400,00	Penilaian dan Penghapusan BMD	BPKPAD	Persentase BMD yang telah dihapuskan	100%	208.404.400,00	

19	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	BPKPAD	Persentase BMD yang telah dihapuskan	100%	79.129.000,00	Implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah	BPKPAD	Persentase BMD yang telah dihapuskan	100%	79.129.000,00	
20	Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Persentase BMD yang telah dilelah/hibah/pemusnahan	100%	145.130.000,00	Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Persentase BMD yang telah dilelah/hibah/pemusnahan	100%	145.130.000,00	
21	Penetapan Status Barang Milik Daerah	BPKPAD	Persentase status BMD yang telah ditetapkan	100%	80.432.160,00	Penetapan Status Barang Milik Daerah	BPKPAD	Persentase status BMD yang telah ditetapkan	100%	80.432.160,00	
<p align="center"><b>Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b></p> <p><i>Kegiatan :</i></p>						<p align="center"><b>Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b></p> <p><i>Kegiatan :</i></p>					
1	Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	BPKPAD	Persentase wajib pajak yang membayar pajak	75%	98.899.000,00	Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	BPKPAD	Persentase wajib pajak yang membayar pajak	75%	98.899.000,00	
2	Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah	BPKPAD	Persentase penerimaan daerah dari pajak daerah	100%	150.339.800,00	Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah	BPKPAD	Persentase penerimaan daerah dari pajak daerah	100%	150.339.800,00	
3	Ekstensifikasi dan Penetapan Pajak daerah	BPKPAD	Wajib pajak yang terdaftar	65.075 WP	119.945.000,00	Ekstensifikasi dan Penetapan Pajak daerah	BPKPAD	Wajib pajak yang terdaftar	65.075 WP	119.945.000,00	
4	Penyusunan Mekanisme /Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD	Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan	2 Peraturan	32.023.100,00	Penyusunan Mekanisme /Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD	Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan	2 Peraturan	32.023.100,00	
5	Implementasi Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2	BPKPAD	Persentase peningkatan PAD dan PBB-P2	0	251.204.800,00	Implementasi Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2	BPKPAD	Persentase peningkatan PAD dan PBB-P2	0	251.204.800,00	
6	Penyusunan laporan pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan	BPKPAD	Temuan BPK terhadap penyajian nilai pendapatan dalam LRA	0 Temuan	67.557.868,00	Penyusunan laporan pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan	BPKPAD	Temuan BPK terhadap penyajian nilai pendapatan dalam LRA	0 Temuan	67.557.868,00	
7	Verifikasi Piutang PBB-P2	BPKPAD	Desa yang memiliki data piutang PBB-P2 yang telah terverifikasi	28 Desa	56.882.300,00	Verifikasi Piutang PBB-P2	BPKPAD	Desa yang memiliki data piutang PBB-P2 yang telah terverifikasi	28 Desa	56.882.300,00	
8	Pengembangan sistem pengelolaan BPHTB berbasis online	BPKPAD	Realisasi BPHTB	100%	64.832.200,00	Pengembangan sistem pengelolaan BPHTB berbasis online	BPKPAD	Realisasi BPHTB	100%	64.832.200,00	

9	Rekonsiliasi dana bagi hasil	BPKPAD	Persentase pendapatan daerah dari DBH	100%	49.312.184,00	Rekonsiliasi dana bagi hasil	BPKPAD	Persentase pendapatan daerah dari DBH	100%	49.312.184,00	
	<b>Program Penataan, Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah</b> <i>Kegiatan :</i>					<b>Program Penataan, Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah</b> <i>Kegiatan :</i>					
1	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Persentase tanah milik Pemerintah yang bersertifikat	60%	260.630.000,00	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	BPKPAD	Persentase tanah milik Pemerintah yang bersertifikat	v	260.630.000,00	
2	Pengamanan BMD Daerah	BPKPAD	Persentase tanah yang telah memiliki plank tanah	58%	130.574.160,00	Pengamanan BMD Daerah	BPKPAD	Persentase tanah yang telah memiliki plank tanah	153 Desa	130.574.160,00	

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019**  
**Prakiraan Maju Tahun 2020**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan**

**Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.433.430.794,00</b>				<b>3.186.037.065,00</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	BPKPAD	2 jenis	88.126.400,00	DAU		2 jenis	101.640.000,00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	BPKPAD	16 jenis	28.543.000,00	DAU		16 jenis	43.932.962,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	BPKPAD	46 item	40.301.844,00	DAU		49 item	69.177.515,00
4	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	BPKPAD	4 jenis	27.637.950,00	DAU		4 jenis	39.859.518,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	BPKPAD	9 item	6.736.600,00	DAU		10 item	8.016.250,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	BPKPAD	78 jenis	57.960.000,00	DAU		78 jenis	66.792.000,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi	BPKPAD	3 kebutuhan	88.780.000,00	DAU		3 kebutuhan	108.053.000,00
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi	BPKPAD	140 kali	648.320.000,00	DAU		156 kali	827.744.060,00

9	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah jasa non PNS yang terpenuhi	BPKPAD	51 orang	1.119.600.000,00	DAU		51 orang	1.387.023.000,00
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang terpenuhi	BPKPAD	124 kali	34.250.000,00	DAU		124 kali	39.544.010,00
11	Penyediaan Jasa Administrasi Perbendaharaan	Jumlah jasa administrasi perbendaharaan yang terpenuhi	BPKPAD	17 orang	233.075.000,00	DAU		17 orang	251.589.250,00
12	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	BPKPAD	9 orang	60.100.000,00	DAU		9 orang	242.665.500,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>168.276.700,00</b>				<b>163.862.000,00</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	BPKPAD	26 unit	52.336.700,00	DAU		26 unit	37.510.000,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	BPKPAD	100%	20.000.000,00	DAU		100%	22.050.000,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas yang terpelihara dengan baik	BPKPAD	18 unit	75.940.000,00	DAU		18 unit	84.942.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	BPKPAD	88%	20.000.000,00	DAU		91%	19.360.000,00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>543.824.100,00</b>				<b>723.032.233,00</b>
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM	Persentase keikutsertaan ASN BPKPAD dalam mengikuti Bimbingan Teknis	BPKPAD	95%	75.000.000,00	DAU		95%	90.750.000,00
2	Bimbingan teknis dan pelatihan keuangan berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah	Persentase ASN Pengelolaan Keuangan yang mengikuti Bimtek Pelatihan Keuangan berbasis akrual	BPKPAD	100%	128.620.900,00	DAU		100%	150.189.193,00
3	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase peserta Bimtek yang mampu menyusun Laporan BMD	BPKPAD	100%	202.266.000,00	DAU		100%	221.124.354,00
4	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran	Persentase ASN pengelola keuangan yang mengikuti Bimtek Penyusunan anggaran	BPKPAD	95%	89.233.200,00	DAU		99%	130.484.343,00

5	Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai	Persentase OPD yang mengimplementasikan Transaksi Non Tunai	BPKPAD	100%	48.704.000,00	DAU		100%	130.484.343,00
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>618.997.850,00</b>				<b>797.223.273,00</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Semester dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya	BPKPAD	Tepat waktu	38.501.700,00	DAU		Tepat waktu	46.636.183,00
2	Penyempurnaan Saldo Aset Tetap dalam Penyusunan LKPD Kab. Humbang Hasundutan	Temuan BPK terhadap Penyajian nilai aset tetap dalam neraca	BPKPAD	0	159.295.000,00	DAU		0	196.184.076,00
3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan Peraturan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKPAD	Tepat waktu	124.989.800,00	DAU		Tepat waktu	170.963.683,00
4	Penyusunan Laporan Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	BPKPAD	Tepat waktu	143.154.700,00	DAU		Tepat waktu	174.902.354,00
5	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, LAKIP dan Bahan LPPD	Laporan pelaksanaan kegiatan OPD	BPKPAD	3 Dokumen	27.913.900,00	DAU		3 Dokumen	32.621.963,00
6	Penyusunan Renstra, Renja SKPD	Dokumen perencanaan yang tersusun	BPKPAD	2 Dokumen	10.873.950,00	DAU		2 Dokumen	22.058.421,00
7	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dan Operasional TEPR	Laporan bulanan realisasi anggaran yang tepat waktu	BPKPAD	Tepat waktu	64.368.500,00	DAU		Tepat waktu	98.966.263,00
8	Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan SKPKD	Persentase Realisasi Keuangan OPD	BPKPAD	96%	49.900.300,00	DAU		97%	54.890.330,00
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				<b>2.842.825.108,00</b>				<b>3.551.411.006,00</b>
1	Penyusunan Standar Satuan Harga, Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Regulasi yang diterbitkan	BPKPAD	1 Regulasi	184.845.500,00	DAU		1 Regulasi	213.852.617,00
2	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	Peraturan yang diterbitkan	BPKPAD	1 Peraturan	29.934.016,00	DAU		1 Peraturan	32.927.417,00



3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang Penjabaran APBD	Ketepatan waktu dalam Penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang APBD	BPKPAD	Tepat waktu	413.366.500,00	DAU		Tepat waktu	476.829.419,00
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran Perubahan APBD	Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda dan Ranperbup tentang P-APBD	BPKPAD	Tepat waktu	300.259.160,00	DAU		Tepat waktu	354.060.157,00
5	Penelitian DPA-SKPD/DPPA-SKPD/Anggaran Kas SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD/Anggaran Kas PPKD	Persentase DPA/DPPA yang telah diteliti sebagai dasar pelaksanaan anggaran	BPKPAD	100%	72.896.200,00	DAU		100%	159.538.500,00
6	Administrasi pengendalian dana APBD	Persentase surat penyediaan dana yang diterbitkan sesuai dengan anggaran kas	BPKPAD	85%	205.924.598,00	DAU		87%	239.348.769,00
7	Penerbitan Gaji Baru, SKPP, Gaji Susulan dan Gaji ke-13	Dokumen gaji yang diterbitkan sesuai dengan usulan penggajian OPD	BPKPAD	100%	65.160.000,00	DAU		100%	65.160.000,00
8	Komputerisasi daftar gaji reguler	Ketepatan waktu dalam penerbitan daftar gaji reguler	BPKPAD	Tepat waktu	61.529.700,00	DAU		Tepat waktu	61.529.700,00
9	Pengelolaan, Pelaporan, dan Pengendalian Dana-dana Kas Daerah	Ketepatan waktu pelaporan dana kas daerah	BPKPAD	Tepat waktu	142.644.700,00	DAU		Tepat waktu	261.688.757,00
10	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah	Laporan Informasi Keuangan Daerah yang tepat waktu	BPKPAD	Tepat waktu	169.695.048,00	DAU		Tepat waktu	227.294.023,00
11	Operasional Aplikasi Kas Daerah secara On-line dengan Jaringan PT. Bank Sumut	SP2D yang diterbitkan melalui aplikasi CMS dari PT Bank Sumut	BPKPAD	100%	65.921.726,00	DAU		100%	94.768.894,00
12	Pengendalian Pencairan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	Persentase realisasi Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang dibayarkan	BPKPAD	100%	73.189.000,00	DAU		100%	104.764.946,00
13	Implementasi Aplikasi Penganggaran E-Budgeting	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan aplikasi e-budgeting	BPKPAD	-	114.827.800,00	DAU		-	126.310.580,00
14	Penyusunan KUA dan PPAS APBD	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS APBD	BPKPAD	90%	165.381.600,00	DAU		93%	231.208.131,00

15	Penyusunan KUA dan PPAS P-APBD	Persentase program yang direncanakan dan yang dianggarkan dalam KUA-PPAS P-ABPD	BPKPAD	90%	158.484.200,00	DAU		93%	184.284.815,00
16	Penyusunan Mekanisme /Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan	BPKPAD	2 Peraturan	45.994.700,00	DAU		2 Peraturan	53.948.818,00
17	Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa melalui Aplikasi OMSPAN	Persentase Realisasi dana DAK dan Dana Desa	BPKPAD	100%	59.675.100,00	DAU		100%	69.344.011,00
18	Penilaian dan Penghapusan Aset	Persentase BMD yang telah dihapuskan	BPKPAD	100%	208.404.400,00	DAU		100%	252.188.805,00
19	Implementasi Sistem Informasi Manajeen Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dicatatkan dalam SIMDA BMD	BPKPAD	100%	79.129.000,00	DAU		100%	94.244.271,00
20	Pelelangan/Hibah/Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang telah dilelang/hibah/pemusnahan	BPKPAD	100%	145.130.000,00	DAU		100%	159.643.000,00
21	Penetapan Status Barang Milik Daerah	Persentase status BMD yang telah ditetapkan	BPKPAD	100%	80.432.160,00	DAU		100%	88.475.376,00
<b>VI</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah</b>				<b>391.204.160,00</b>				<b>448.119.444,00</b>
1	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Persentase tanah milik Pemerintah yang bersertifikat	BPKPAD	60%	260.630.000,00	DAU		65%	325.096.929,00
2	Pengamanan Aset Daerah	Persentase tanah yang telah memiliki plank tanah	BPKPAD	58%	130.574.160,00	DAU		63%	123.022.515,00
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				<b>890.996.252,00</b>				<b>982.437.002,00</b>
1	Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase wajib pajak yang membayar pajak	BPKPAD	75%	98.899.000,00	DAU		80%	113.681.920,00
2	Intensifikasi dan Pemungutan Pajak Daerah	Persentase penerimaan daerah dari pajak daerah	BPKPAD	100%	150.339.800,00	DAU		100%	150.157.733,00
3	Ekstensifikasi dan Penetapan Pajak daerah	Wajib pajak yang terdaftar	BPKPAD	65.075 WP	119.945.000,00	DAU		66.275 WP	131.930.051,00

4	Penyusunan Mekanisme /Peraturan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peraturan tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan	BPKPAD	2 Peraturan	32.023.100,00	DAU		2 Peraturan	38.931.750,00
5	Implementasi Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2	Persentase peningkatan PAD dari PBB-P2	BPKPAD	0	251.204.800,00	DAU		-	286.846.835,00
6	Penyusunan Laporan Pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan	Temuan BPK terhadap penyajian nilai pendapatan dalam LRA	BPKPAD	0 Temuan	67.557.868,00	DAU		0 Temuan	67.557.868,00
7	Verifikasi Piutang Daerah	Desa yang memiliki data Piutang PBB P2 yang telah terverifikasi	BPKPAD	28 Desa	56.882.300,00	DAU		33 Desa	61.424.803,00
8	Pengembangan Sistem Pengelolaan BPHTB Berbasis online	realisasi BPHTB	BPKPAD	100%	64.832.200,00	DAU		100%	77.662.640,00
9	Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil	Persentase Pendapatan Daerah dari DBH	BPKPAD	100%	49.312.184,00	DAU		100%	54.243.402,00

